LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE 1 JULI 2024 – 30 SEPTEMBER 2024

A. MONITORING

Survei persepsi anti korupsi dilakukan secara elektronik melalui website e-survey badilum dan guna memudahkan masyarakat untuk mengisi kuesioner, masing-masing petugas PTSP menyiapkan kuesioner tercetak dengan format sesuai dengan kuesioner elektronik atau mengarahkan pengunjung agar melakukan pengisian survei secara elektronik dengan membuka link website http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036.

IPAK periode 1 Juli 2024 – 30 September 2024 pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,83 / 95,66 % dan berada pada kategori sangat baik. Adapun nilai masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,791	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,857	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	3,868	Sangat Baik
4	Transparansi Biaya	3,714	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	3,824	Sangat Baik
6	Hadiah	3,879	Sangat Baik
7	Transparansi Pembayaran	3,681	Sangat Baik
8	Percaloan	3,879	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	3,890	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	3,879	Sangat Baik

B. EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring, ditemukan 3 nilai terendah yang akan menjadi evaluasi yaitu terletak pada unsur :

- 1. Bukti transaksi keuangan/pembayaran
- 2. Informasi tarif/biaya melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan
- 3. Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE 1 JULI 2024 – 30 SEPTEMBER 2024

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 fokus perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey sebagai berikut :

1. Bukti transaksi keuangan/pembayaran

Tindak lanjut pada unsur apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) yaitu pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mendapatkan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah berupa kuitansi pembayaran yang dilakukan di meja kasir.



Foto : Kuitansi Pembayaran PNBP pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

2. Informasi tarif/biaya melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan yaitu pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga dapat dengan mudah memperoleh infirmasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan ataupun informasi mengenai tarif/biaya yang sudah ditempel pada dinding di area dekat ruang sidang.

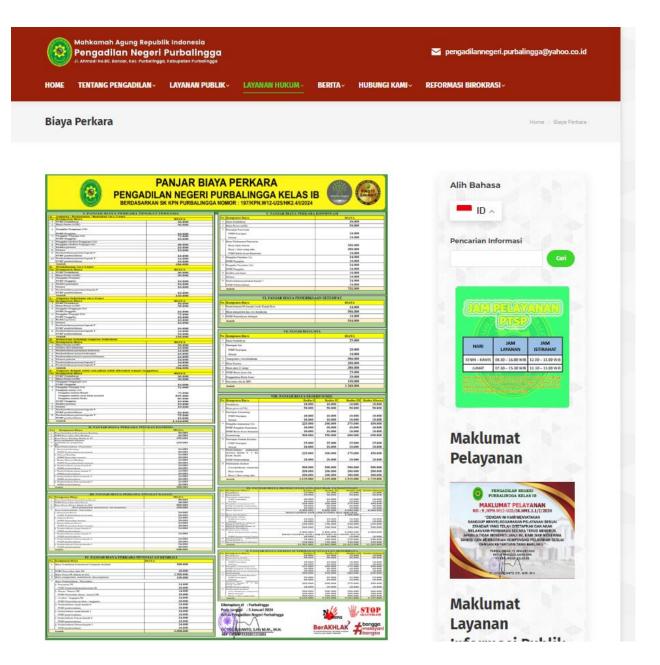


Foto : Biaya perkara melalui website pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

3. Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu pelayanan oleh petugas di Pengadilan Negeri Purbalingga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku disamping itu setiap briefing pagi PTSP pembina briefing selalu memberi arahan kepada petugas PTSP agar selalu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan prosedur dan pedoman yang berlaku dan selalu menerapkan 5R dan 5S.



Foto : Kegiatan briefing pagi pada Pengadilan Negeri Purbalingga